

Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya Pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih

Rosalia Septiasari¹⁾, Meirani Betriana²⁾, Emi Sukmawati³⁾

^{1,2,3} Universitas Prabumulih, Indonesia

Email: roshaliaochoa138@gmail.com¹, meiranibetriana555.ypp@gmail.com²,
emisukmawati579@gmail.com³

Abstract: *This study aims to determine the implementation of budget accountability accounting as a form of cost control at the Prabumulih City Transportation Agency. The type of research used in this study is qualitative research. Data collection techniques in this study were carried out through observation, interviews, documentation, and literature studies. The data obtained from this study were in the form of primary and secondary data. The results of this study indicate that the Prabumulih City Transportation Agency has implemented most of the five main requirements/elements of accountability in accounting, which is supported by a clear organizational structure in accordance with Mayoral Regulation Number 41 of 2025. Budget preparation is carried out in a participatory manner. The classification of account codes is integrated with the SIPD system based on Permendagri Number 90 of 2019. As well as accountability reports that are implemented optimally through the digitalization of the SIPD system in the form of LRA.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban anggaran sebagai bentuk pengendalian biaya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah menerapkan sebagian besar lima syarat/unsur utama dari akuntansi pertanggungjawaban, yang didukung oleh struktur organisasi yang jelas sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2025. Penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif. Klasifikasi kode rekening yang terintegrasi dengan sistem SIPD berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Serta laporan pertanggungjawaban yang diterapkan dengan sangat optimal melalui digitalisasi sistem SIPD dalam bentuk LRA.*

Keywords: *Accountability, Accounting, Budget, Cost Control*

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang semakin kompetitif menuntut pengelolaan keuangan negara, khususnya pada instansi pemerintah daerah, untuk menerapkan sistem akuntansi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan negara tidak lepas dari pengendalian yang baik untuk membantu pimpinan mengatasi masalah operasional, karena tanpa mekanisme pengendalian yang kuat, pengelolaan anggaran rentan menimbulkan kesalahan atau pemborosan yang dapat merugikan instansi. Akuntansi pertanggungjawaban anggaran menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem akuntansi pemerintahan untuk menilai kinerja anggaran serta memastikan penggunaan dana publik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Akuntansi pertanggungjawaban

merupakan salah satu cabang akuntansi manajemen yang dikaitkan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi atau instansi dan melaporkan kinerja pimpinan pusat pertanggungjawaban dalam mengelola pekerjaan yang berada di bawah pengawasannya (Narsa, 2023). Dinas Perhubungan Kota Prabumulih yang beralamat di Jl. Lingkar Timur Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Gedung Terminal Kota Prabumulih merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di sektor transportasi dan infrastruktur perhubungan. Besarnya tanggung jawab tersebut menegaskan posisi strategis Dinas Perhubungan dalam mendukung keseluruhan pembangunan di Kota Prabumulih, khususnya dalam menjamin kelancaran sistem transportasi daerah. Mengingat Kota Prabumulih sebagai jalur penghubung transportasi perdagangan minyak dan gas di wilayah Sumatera Selatan.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	%
2023	7.713.900.395	6.523.155.961	84,56
2024	7.067.732.000	6.803.575.547	96,26

Sumber :LRA Dinas Perhubungan Kota Prabumulih 2023-2024

Berdasarkan Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Prabumulih pada tahun 2023 realisasi mencapai sebesar Rp6.523.155.961 atau sekitar 84,56% dari total anggaran Rp7.713.900.395. Pada tahun 2024, realisasi anggaran menjadi Rp6.803.575.547 atau sekitar 96,26% dari total anggaran sebesar Rp7.067.732.000. Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan persentase realisasi anggaran, walaupun total anggaran pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp646.168.395, Kinerja penyerapan anggaran meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Prabumulih sudah lebih baik dari tahun sebelumnya dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran yang bersumber dari APBD. Situasi ini secara jelas menunjukkan adanya peningkatan perbaikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program kegiatan yang dilaksanakan, khususnya di sektor transportasi dan infrastruktur perhubungan. Pencapaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor serta praktik pertanggungjawaban seperti apa yang telah diterapkan oleh instansi terkait dalam pengelolaan anggaran dan pengendalian biaya, sehingga dapat mencapai peningkatan kinerja yang signifikan pada tahun 2024. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya Pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih”.

Akuntansi pertanggungjawaban dalam organisasi yang terdesentralisasi dapat bermanfaat dan memberi informasi penting dalam pengelolaan organisasi. Untuk dapat menerapkan akuntansi

pertanggungjawaban, terdapat syarat-syarat/unsur yang harus dipenuhi dalam organisasi atau instansi (Kholmi, 2019), yaitu:

1. Struktur organisasi

Struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggung jawab dan wewenang yang jelas serta didukung oleh pembagian tugas yang jelas agar sistem akuntansi pertanggungjawaban berfungsi efektif sebagai alat pengendalian dan pengukuran kinerja.

2. Anggaran

Setiap pusat pertanggungjawaban harus berpartisipasi dalam penyusunan anggaran sebagai dasar rencana kerja, penilaian kinerja, serta alat perencanaan dan pengendalian.

3. Penggolongan biaya

Biaya harus dipisahkan menjadi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali sehingga masing-masing pimpinan dapat dimintai pertanggungjawaban atas anggaran dan realisasinya.

4. Pengklasifikasian kode rekening

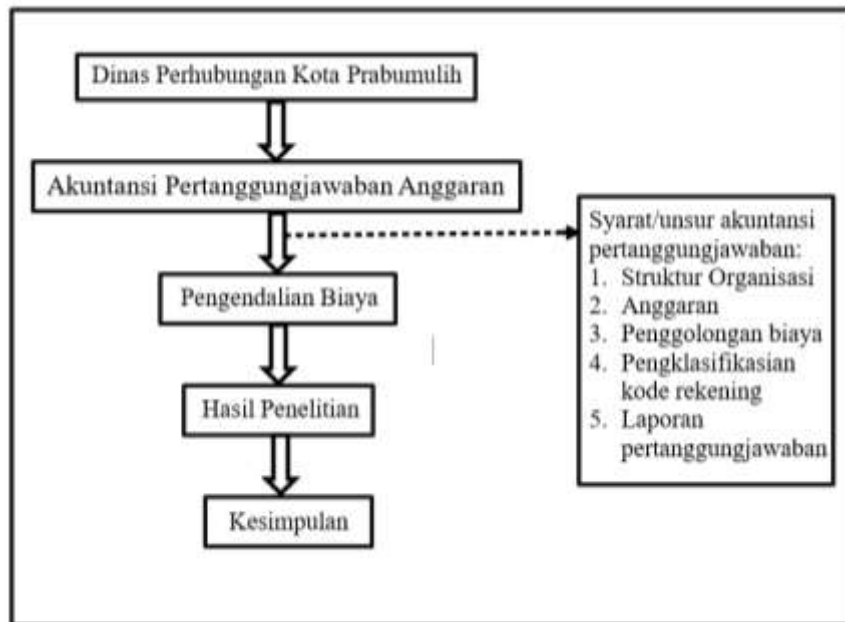
Setiap biaya harus diberi kode rekening yang jelas agar mempermudah pengawasan, pengklasifikasian akun, dan pertanggungjawaban biaya.

5. Laporan pertanggungjawaban Laporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan rekapitulasi biaya dan disesuaikan dengan tingkatan manajemen sebagai dasar pertanggungjawaban dan evaluasi.

Anggaran merupakan suatu perencanaan keuangan perusahaan untuk masa yang akan datang, sekaligus berperan sebagai alat pengendalian. Anggaran menunjukkan suatu perencanaan rinci yang menunjukkan bagaimana pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dipakai selama periode tertentu di masa depan (Narsa, 2023). Anggaran merupakan salah satu alat yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian semua kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang, yang mencakup pengembangan strategi jangka pendek maupun jangka panjang, hingga pengembangan prosedur tindak lanjut (Betriana et al., 2022). Pengendalian Biaya Pengendalian biaya adalah usaha untuk mencapai target biaya dalam kegiatan tertentu. Metode yang dapat digunakan untuk mengendalikan biaya seperti program pengurangan biaya dan perhatian terhadap keberlanjutan pada keputusan terkait biaya serta pengeluaran (Prakoso, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada umumnya telah berjalan dengan cukup baik sebagai alat pengendalian biaya. Namun, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan, yaitu belum dipisahkannya biaya terkendali dan biaya tidak terkendali, sehingga penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum sepenuhnya optimal. Sementara itu, hanya penelitian Sharon et al. (2021) yang menunjukkan bahwa seluruh syarat akuntansi pertanggungjawaban telah diterapkan sehingga pengendalian biaya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada waktu dan objek

penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 dengan objek penelitian di Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber : Penulis 2026

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Prabumulih yang berlokasi di Jl. Lingkar Timur, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Gedung Terminal Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang dilakukan pada 1 Oktober 2025–30 April 2026. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa data kualitatif yang bersumber dari data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa dokumen laporan realisasi anggaran. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perhubungan Kota Prabumulih yang mengelola anggaran serta informasi data laporan realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perhubungan Kota Prabumulih yang mengelola anggaran serta informasi data laporan realisasi anggaran tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih. Teknik sampling menggunakan teknik Nonprobability Sampling, yaitu Purposive Sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih

Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih dapat dilihat dari beberapa syarat/unsur yang menjadi landasan utama yang harus dipenuhi dalam instansi agar penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik yaitu sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih sudah menggambarkan aliran tanggung jawab, menetapkan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, serta telah diatur secara resmi melalui Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 41 Tahun 2025 serta SK PPTK. Alur kerja pada Dinas Perhubungan juga dilakukan sesuai tingkatan, di mana instruksi bergerak dari tingkat atasan ke tingkat bawahan, sementara pelaporan pertanggungjawabannya mengalir dari tingkat paling bawah ke tingkat atas. Meskipun masih terdapat kendala terkait penempatan staf/pegawai yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, namun Dinas Perhubungan ini dapat mengatasinya melalui proses adaptasi secara mandiri serta melalui program pelatihan atau diklat. Selain itu, setiap Kepala Bidang yang menduduki jabatan Eselon III dan IV diberikan wewenang penuh untuk melaksanakan kegiatan dan menjalankan program kerja pada bidang dan unit masing-masing. Jadi secara keseluruhan, struktur organisasi ini telah berfungsi dengan baik dan jelas dalam mendukung kelancaran operasional kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Anggaran

Sistem anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih juga telah berfungsi dengan sangat baik sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Hal ini terlihat dari proses penyusunan anggaran yang bersifat partisipatif, di mana setiap unit kerja dilibatkan langsung untuk menyampaikan kebutuhan nyata mereka melalui Rencana Kerja (Renja). Cara ini sangat efektif karena setiap kepala bidang dan unit kerja menjadi lebih bertanggung jawab terhadap anggaran yang mereka usulkan. Selain itu, anggaran yang disusun juga dipastikan searah dengan program kerja Wali Kota agar tepat sasaran. Selain itu, pengelolaan anggaran ini mencakup tahapan yang komprehensif dalam jangka waktu satu tahun, mulai dari perencanaan hingga tahap pelaporan dan evaluasi. Penegasan mengenai pembagian tanggung jawab pada setiap program kerja menunjukkan adanya upaya untuk mencapai target instansi secara efektif dan transparan. Selain itu, DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) juga digunakan sebagai acuan utama dalam mengontrol biaya, guna memastikan setiap pengeluaran tetap berada dalam batas plafon agar tidak terjadi pemborosan (*over budget*).

3. Penggolongan biaya

Penggolongan biaya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih dalam aktivitas operasionalnya itu telah ada biaya yang mungkin dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Namun, dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, biaya tersebut belum diklasifikasikan secara spesifik ke dalam kategori biaya terkendali dan tidak terkendali, melainkan masih digabungkan dalam satu laporan penggolongan standar secara umum berdasarkan jenis belanja, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal peralatan dan mesin. Dengan demikian, penggolongan biaya terkendali dan tidak terkendali pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih ini belum diterapkan secara resmi dalam pembukuan dan pelaporannya. Karena dalam pencatatannya belum dipisah secara spesifik antara biaya terkendali dan tidak terkendali.

4. Pengklasifikasian kode rekening

Pengklasifikasian kode rekening pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah diterapkan secara sistematis. Penggunaan kode rekening ini telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan disusun berdasarkan pedoman resmi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah. Penerapan kode rekening yang berbeda untuk setiap program bertujuan agar setiap pengeluaran tercatat secara akurat, sekaligus mempermudah proses pengawasan sehingga tidak tertukar. Penerapan ini dapat memastikan setiap penggunaan dana terpantau dengan jelas sehingga seluruh program kerja dapat terlaksana serta dapat memberikan hasil yang nyata.

5. Laporan Pertanggungjawaban

Sistem pelaporan pertanggungjawaban pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah diterapkan secara sistematis menggunakan aplikasi SIPD. Setiap pimpinan di unit kerja, mulai dari Kepala Bidang hingga Kepala UPTD, telah memenuhi kewajibannya dalam melaporkan setiap biaya yang digunakan. Penggunaan aplikasi SIPD dapat memudahkan proses rekapitulasi data menjadi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara otomatis dan akurat. Hal ini memudahkan pimpinan untuk melihat secara langsung berapa besar anggaran yang sudah terpakai dan bagaimana persentase pencapaian kerja di masing-masing bidang. Adanya laporan ini sangat penting karena berfungsi sebagai alat pengendalian biaya agar tidak terjadi pemborosan. Dengan laporan yang terperinci, pimpinan bisa lebih mudah mengawasi pengeluaran dan memastikan semua dana digunakan sesuai dengan rencana. Secara keseluruhan, sistem pelaporan ini tidak hanya sekadar memenuhi urusan administrasi, tetapi juga membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan syarat kelima dari akuntansi pertanggungjawaban di instansi ini sudah berjalan dengan baik.

Peran Dan Evaluasi Anggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya Pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih

Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah menjadikan anggaran sebagai instrumen pengendalian biaya yang efektif melalui sistem pemantauan yang ketat. Kerja sama antara pengawasan langsung lewat laporan bulanan dan penggunaan aplikasi SIMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi) dapat memudahkan pimpinan untuk menemukan kesalahan sejak awal, sehingga setiap selisih anggaran dapat dikelola secara terbuka. Hal ini membuat penggunaan dana di instansi menjadi akurat, dan dapat dipercaya.

KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Dinas Perhubungan Kota Prabumulih sebagian besar telah menerapkan lima syarat/unsur utama dari akuntansi pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan adanya aliran tanggung jawab dari struktur organisasi yang jelas sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2025. Penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif. Klasifikasi kode rekening yang terintegrasi dengan sistem SIPD berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Serta laporan pertanggungjawaban yang diterapkan dengan sangat optimal melalui digitalisasi sistem SIPD dalam bentuk LRA. Namun, terkait penggolongan biaya antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali, instansi ini belum memisahkannya secara spesifik dalam sistem pencatatan dan pelaporannya. Optimalisasi anggaran sebagai bentuk pengendalian biaya juga telah dilakukan dengan baik melalui pemantauan sistematis dan evaluasi berbasis aplikasi SIMONEV. Integrasi struktur organisasi yang baik dan pengawasan ketat terbukti dapat meminimalkan penyimpangan, terlihat dari peningkatan signifikan penyerapan anggaran dari 84,56% tahun 2023 menjadi 96,26% tahun 2024. Keberhasilan ini didorong oleh peralihan penuh ke aplikasi SIPD yang mendukung pengawasan secara real-time dan pelaporan otomatis yang meningkatkan akurasi data keuangan pada instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, et al. (2024) Akuntansi Manajemen. PT. Penamuda Media.
- Arianti, B.F. (2025). Akuntansi Manajemen Konsep dan Latihan Soal. PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Bawang, R.M., Herdi, H., & Rangga, Y.D.P. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Pinter Asia Swalayan Maumere. Jurnal Penelitian Mahasiswa, 2(3): 123–133.
- Betrian, M., Adelina, C., & Alkahfi, B.D. (2022). Akuntansi Manajemen: Konsep dan Dasar dalam Pengambilan Keputusan. CV. Amanah.

- Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kholmi, M. (2019). Akuntansi Manajemen. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Labangu, Y.L., Arifuddin, & Asmawati. (2023) Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT. Pegadaian Cabang Kendari. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8(1): 272-283.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Semester I Tahun. (2023). Diakses dari <https://www.bpk.go.id>
- Mendrofa, F. A. M., & Susilowati, K. (2024). Metodologi Penelitian Kuantitatif. PT. Penerbit Penamuda Media.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. JDIH Kementerian Keuangan : <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/f0614335-ba08-4b1d-b925-08e710c3cc76/2023pmkeuangan062.pdf>.
- Mukin, A.M., Dince, M.N., & Dilliana, S.M. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Dana Bantuan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka. Jurnal Accounting UNIPA, 2(1): 155- 165.
- Narsa, I. Made. (2023). Akuntansi Manajemen. Universitas Terbuka.
- Nursanty et al. (2022). Akuntansi Manajemen. Seval Literindo Kreasi.
- Prakoso, Teguh. (2024). Strategi Pengendalian Biaya Dalam Pengelolaan Bisnis. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Purwanti, Ari. (2023). Akuntansi Manajemen. Salemba Humanika.
- Rahmadani, Ida. (2024). Akuntansi Manajemen dan Penganggaran Perusahaan. Media Ilmu.
- Santoso et al. (2023). Akuntansi Manajemen. Eureka Media aksara.
- Sharon, E., & Mintalangi, S. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Pln) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara. Jurnal EMBA (Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi), 9(1): 1046-1057.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2025). Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami. Pustaka Baru Press.
- Torina, E. G., Susanti, N., & Hidayah, N. R. (2022). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran Sebagai Pengendalian Biaya pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu. Jurnal EKOMBIS (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis), 10(S1):89–98.

Wali Kota Prabumulih. (2025). Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih. Prabumulih: JDIH Kota Prabumulih.